



BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5 daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada disisi utara. Wilayah Kabupaten Sleman membentang dari Sungai Opak pada sisi timur sampai Sungai Progo pada sisi barat dan perbatasan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul pada sisi selatan, dan pada sisi utara sampai dengan lereng Gunung Merapi yang termasuk 10 besar gunung teraktif di dunia berketinggian 2.968 meter. Dengan posisi tersebut menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah hulu dari Propinsi DIY.

Pengembangan Wilayah Kabupaten Sleman sebagai bagian integral dari Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat terlepas dari kawasan-kawasan bawahan seperti Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pembangunan Kabupaten Sleman lebih diarahkan sebagai pusat pendidikan, lumbung pangan DIY, pengembangan kebudayaan sebagai pendukung kepariwisataan DIY, sentra industri kecil dan menengah, agro industri dan industri jasa.

Dengan *comparative advantage* yang dimiliki Kabupaten Sleman, menjadikan Sleman sebagai alternatif skala nasional untuk tujuan investasi baik dalam hal pendidikan maupun bisnis bagi masyarakat luar daerah. Hal ini berpengaruh pada demografi Kabupaten Sleman karena banyaknya pendatang dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Dalam perkembangannya, Kabupaten Sleman dapat diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Walaupun demikian kehidupan masyarakat Sleman baik penduduk asli maupun pendatang dapat berinteraksi dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kultur Jogja tanpa meninggalkan kultur budaya masing-masing etnik.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 diwarnai dengan terjadinya erupsi Merapi pada periode bulan Oktober –November. Erupsi ini banyak berpengaruh pada kehidupan masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel. Selain menelan korban jiwa, rumah dan harta, sebagian lahan pertanian dan hutan di wilayah Kecamatan Cangkringan dan Pakem mengalami kerusakan parah. Sarana prasarana dan



fasilitas umum serta fasilitas sosial di wilayah tersebut juga banyak mengalami kerusakan.

Erupsi Merapi mengharuskan masyarakat yang bermukim sampai dengan radius 15 kilometer dari puncak Merapi mengungsi. Upaya evakuasi dan penanggulangan bencana erupsi Merapi dilakukan lintas sektoral dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Penyaluran bantuan, relokasi pengungsi dan rehabilitasi masyarakat dilakukan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkringan, Turi, Pakem dan Tempel dilakukan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kantor kecamatan, desa, puskesmas dan sekolah-sekolah dipindahkan ke daerah-daerah yang masih memungkinkan dan berada di daerah aman. Beberapa program dan kegiatan yang sudah disusun pada awal tahun menjadi tidak mungkin dilaksanakan karena efek dari erupsi ini.

A. KONDISI KABUPATEN SLEMAN

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara 107° 15' 03" dan 100° 29' 30" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 03" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Luas Wilayah

Kabupaten Sleman memiliki wilayah seluas adalah 57.482 Ha atau 574,82Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80Km²), dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur-Barat 35Km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Padukuhan.



3. Topografi

Keadaan tanah wilayah Kabupaten Sleman dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara kondisinya relatif miring dan dibagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar ± 100 sumber mata air, yang airnya mengalir ke sungai – sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Disamping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 s/d > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian < 100 m; $100 - 499$ m; $500 - 999$ m; dan > 1000 m dari permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203Ha atau 10,79% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah.

Wilayah dengan ketinggian $100 - 499$ m dari permukaan laut seluas 43.246Ha atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan.

Wilayah dengan ketinggian $500 - 999$ m dari permukaan laut meliputi luas 6.538ha atau 11,38% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495Ha atau 2,60% dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

4. Karakteristik Wilayah

a. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu:

- 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya. Keberadaan Gunung Merapi merupakan asset wisata maupun sumber daya alam galian C, namun diperlukan antisipasi yang memadai untuk mengeliminir dampak lain negatif jika terjadi erupsi.

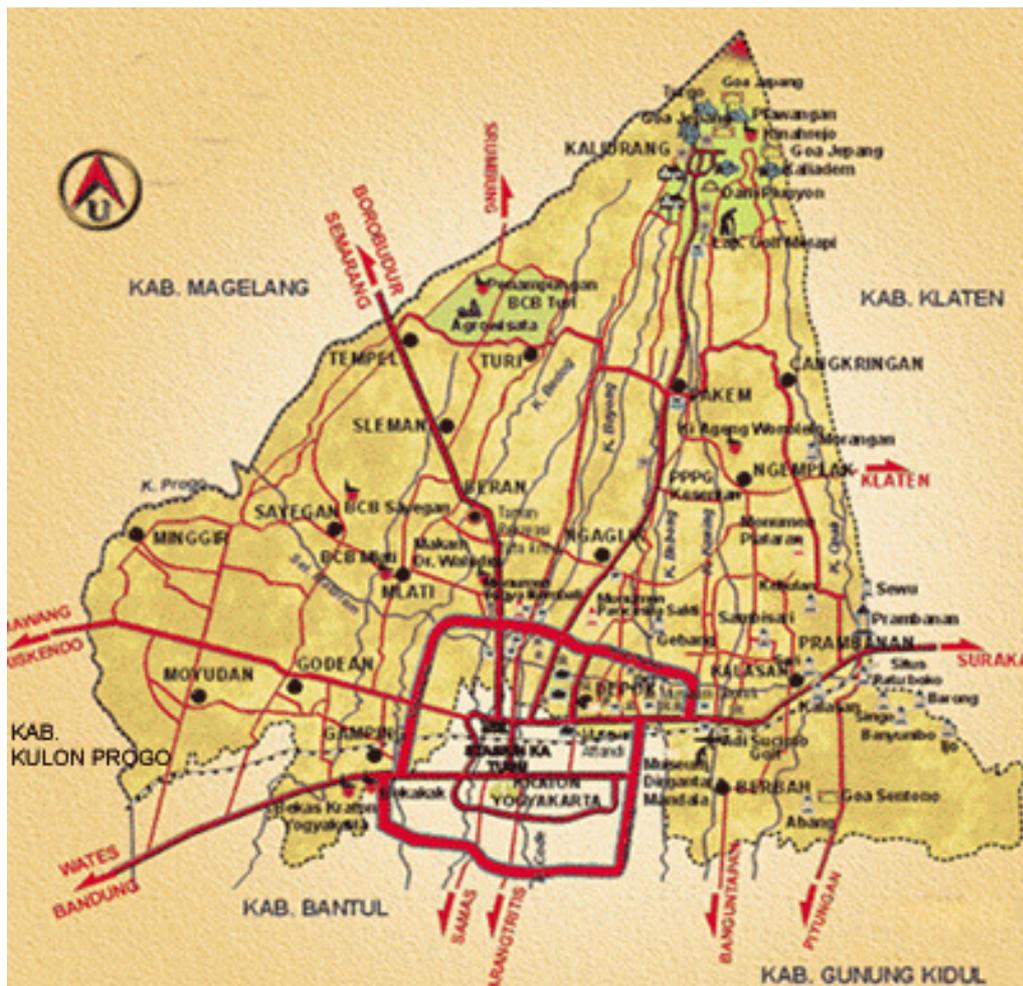


- 2) Kawasan timur, meliputi Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Di wilayah ini terdapat banyak peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya. Kondisi lahan kering, memiliki cadangan bahan batu putih yang cukup banyak.
 - 3) Kawasan tengah, yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - 4) Kawasan barat, meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah dengan irigasi yang baik dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu dan gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Sleman, Tempel dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang dan mengalami perubahan dari daerah pertanian menjadi wilayah industri, perdagangan dan jasa.
- c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati sebagai wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
 - 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan

masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

- 3) Wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Peta Wilayah Kabupaten Sleman



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman

5. Aparat Pemerintah

Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2010 sejumlah 13.415 Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kondisi sebagai berikut:



Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

- a. Golongan I : 232 orang, Golongan II : 2.897 orang, Golongan III : 4.636 orang, Golongan IV : 5.650 orang.
- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Esselon II : 26 orang, Esselon III: 142 orang, Esselon IV: 550 orang.
- c. Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Jabatan fungsional umum sejumlah 3.597 orang
 - 2) Jabatan fungsional Khusus Apoteker 9 orang, Asisten Apoteker 52 orang, Auditor 32 orang, Bidan, 192 orang, Dokter Umum 89 orang, Dokter Gigi 41 orang, Dokter Spesialis 19 orang, Epidemiologi Kesehatan 13 orang, Fisioterapi 3 orang, Guru 7.176 orang, Instruktur Latihan Kerja 37 orang, Kepala Sekolah 601 orang, Nutrisionis 47 orang, Pamong Belajar 10 orang, Pengawas ketenagakerjaan 4 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 18 Orang, Pegawai Sekolah 64 orang, Penguji Kendaraan Bermotor 11 orang, Penilik 9 orang, Penyuluh Kehutanan 13 orang, Penyuluh Keluarga Berencana 65 orang, Penyuluh Kesehatan Masyarakat 9 orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 6 orang, Penyuluh Pertanian 102 orang, Perantara Hubungan Industrial 4 orang, Perawat 342 orang, Perekam Medis 49 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan 60 orang, Pustakawan 9 orang, Sanitarian 7 orang, dan Teknis Elektromedis 7 orang.
- d. Tingkat Pendidikan :SD 166 orang , SMP 339 orang, SMA 3.535 orang, D1 235 orang, D2 2.430 orang, D3 967 orang, Sarjana Muda 342 orang, D4 41 orang, S1 4.995 orang, S2 365 orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai program dan kegiatan antara lain dengan memberikan penghargaan, pelatihan, dan pemberian hukuman dan pembinaan.

- a. Pemberian penghargaan
 - Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 405 orang
 - Pemberian penghargaan Purna Tugas 400 orang



- b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 503 orang
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 54 orang.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa sebanyak 197 orang
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi guru sebanyak 40 orang.
 - 5) Calon Kepala Sekolah sebanyak 30 orang.
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan Fungsional
 - o Pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 439 orang
- c. Pemberian Hukuman
Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 10 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 5 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat 5 orang.
- d. Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.848 orang.
- e. Pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan pengadaan CPNS sejumlah 194 orang yang terdiri dari CPNS tenaga teknis 42 orang, tenaga kesehatan 61 orang dan tenaga guru 91 orang. Dari 194 formasi terisi 185 formasi yang terdiri dari tenaga teknis 41 formasi, tenaga kesehatan 60 formasi dan tenaga guru 84 formasi.

6. Perekonomian.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 10,39 % per tahun yaitu dari Rp 8,89 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp13,19 triliun pada tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami kenaikan rata-rata 4,58% per tahun yaitu dari Rp5,31 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp6,35 triliun di tahun 2010.



Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010 (Jutaan Rupiah)

No	PDRB	2006	2007	2008	2009*	2010**
1.	ADHB	8.898.867	9.972.193	11.446.071	12.503.760	12.094.832
2.	ADHK	5.309.059	5.553.580	5.836.246	6.089.557	5.822.968

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara.

**) = angka sangat sementara.

b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah pada tahun 2010 sektor primer sebesar 16,48%, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 16,94%, sektor sekunder sebesar 27,32%, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 27,25%, dan sektor tersier 56,2% mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 55,79%.

Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian.

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun meningkat rata-rata per tahun 8,48%. Pada tahun 2006 pendapatan perkapita sebesar Rp8.763.123,00 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp12.094.832,00. Demikian juga PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) meningkat rata-rata per tahun 2,09% yaitu dari Rp5.240.006,00 pada tahun 2006 menjadi Rp5.822.968,00 pada tahun 2010.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 tumbuh 4,50% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4,61% dan pada tahun 2010 turun menjadi 4,11%.



e. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 7,46% mengalami kenaikan jika dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,10%.

Pada tahun 2010 inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 22,02% dan inflasi terendah pada kelompok pengeluaran kesehatan 0,60%. Pada tahun 2009 inflasi tertinggi pada kelompok sandang sebesar 11,22 dan inflasi terendah pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga sebesar -3,52%

7. Bidang Keuangan Daerah dan Investasi

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun



anggaran 2009 sebesar Rp996.351.421.460,84 menjadi Rp1.095.629.962.415,93 realisasi belanja tahun 2010 sebesar Rp1.131.603.965.904,14 sehingga terjadi defisit sebesar (Rp35.974.003.488,21).

Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp164.125.626.539,66 dan pengeluaran daerah sebesar Rp16.738.244.928,40.

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.095.629.962.415,93 didukung oleh PAD sebesar Rp163.057.533.993,93 realisasi PAD ini tidak mencapai target. Target yang direncanakan sebesar Rp163.530.209.690,15 atau tercapai 99,71%.

8. Sosial Budaya.

a. Penduduk.

Jumlah penduduk pada tahun 2010 sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 1.117.176 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 555.070 jiwa (49,68%) dan perempuan 562.106 jiwa (50,31%) dan rata-rata kepadatan penduduk 2.033 jiwa per km².

Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Depok sebesar 3.660 jiwa per km² dan Mlati sebesar 3.398 jiwa per km². Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Cangkringan sebesar 691 jiwa per km² dan Kecamatan Pakem sebesar 868 jiwa per km², selengkapnya seperti pada tabel 2 berikut :



Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2010 (data dari sensus penduduk Tahun 2010)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan
			Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Moyudan	27,62	18.324	19.261	37.585	1.361
2	Minggir	27,27	18.909	19.937	38.846	1.424
3	Seyegan	26,63	26.324	27.172	53.496	2.009
4	Godean	26,84	37.195	37.783	74.978	2.794
5	Gamping	29,25	46.798	46.941	93.739	3.205
6	Mlati	28,52	48.205	48.711	96.916	3.398
7	Depok	35,55	65.473	64.623	130.096	3.660
8	Berbah	22,99	24.952	25.387	50.339	2.190
9	Prambanan	41,35	32.748	30.163	62.911	1.521
10	Kalasan	35,84	35.948	36.430	72.378	2.019
11	Ngemplak	35,71	30.022	31.132	61.154	1.713
12	Ngaglik	38,52	48.967	49.484	98.451	2.556
13	Sleman	31,32	33.981	34.910	68.891	2.200
14	Tempel	32,49	32.544	33.513	66.057	2.033
15	Turi	43,09	19.644	20.289	39.933	927
16	Pakem	43,84	18.677	19.361	38.038	868
17	Cangkringan	47,99	16.249	16.900	33.149	691
	WNA		110	109	219	
	Jumlah	574,82	555.070	562.106	1.117.176	2.033

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, 2010

Dari jumlah penduduk tersebut keseluruhan jumlah KK di Sleman adalah 391.221 KK. Pada tahun 2010 registrasi penduduk yang lahir sebanyak 6.762 jiwa, penduduk yang meninggal sebanyak 3.081 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 14.056 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 8.536 jiwa.

b. Tenaga Kerja

Pada tahun 2010 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar bergerak di sektor jasa yakni sebanyak 34,57% dan sektor pertanian sebanyak 24,39%. Pada tahun 2010 terdapat kecenderungan perubahan dominasi mata pencaharian penduduk yang cenderung mengarah pada sektor jasa, tidak lagi pada sektor perdagangan sebagaimana tahun 2009. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika ekonomi penduduk Kabupaten Sleman semakin menguat ke arah



sektor tersier. Secara rinci struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel 3

Tabel 3 . Proporsi Penduduk Kab. Sleman yang Bekerja Per Lapangan Usaha (%) Tahun 2010

No	Sektor	Tahun		
		2008 (%)	2009(%)	2010(%)
1	2	3	4	5
1	Pertanian	18,44	20,31	24,39
2	Pertambangan & Penggalian	0,61	0,67	3,33
3	Industri	15,48	12,83	8,05
4	Listrik, Gas & Air	0,07	0,30	2,20
5	Bangunan	7,08	7,77	8,01
6	Perdagangan	27,07	26,36	12,10
7	Angkutan dan Komunikasi	4,25	3,42	4,00
8	Keuangan	3,75	3,43	3,35
9	Jasa-jasa	23,31	24,90	34,57
	Jumlah	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kabupaten Sleman.

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang cukup besar ikut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya penduduk yang tidak bekerja yang mencapai 14,03%, yang pada tahun 2009 jumlahnya sebesar 10,77%.

Tabel 4 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Bekerja	380.780	422.490	415.295
2	Tidak Bekerja	44.558	45.534	58.295
3	Jumlah	425.338	468.024	473.590
	Persentase tidak bekerja	10	9	12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman

c. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat antara lain dapat dilihat dari indikator rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat.

Pada tahun 2010, rata-rata usia harapan hidup sebesar 74,83 tahun , lebih tinggi jika dibanding usia harapan hidup tingkat Provinsi DIY yaitu 74 tahun ataupun nasional sebesar 70,6 tahun. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yakni 76,70 tahun sedangkan laki-laki 73,04 tahun.



Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dipertahankan di bawah 10 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 sebesar 5,78 per 1000 kelahiran hidup. Kematian ibu (AKI) pada tahun 2010 sebesar 112,15 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk status gizi buruk balita pada tahun 2010 sebesar 0,66%.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2009, nilai IPM Kabupaten Sleman sebesar 77,70 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 77,24. Capaian IPM tahun 2010 memperlihatkan nilai untuk komponen kesehatan sebesar komponen kesehatan 82,90, komponen pendidikan sebesar 84,08 serta komponen pendapatan sebesar 66,12. Nilai IPM tersebut menempatkan Kabupaten Sleman pada peringkat 14 untuk tingkat kabupaten dan kota secara nasional.

B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sleman dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sleman dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.



b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Dengan dijadikannya Kabupaten Sleman sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan wajib sebagaimana disebut diatas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja serta lain-lain urusan seperti urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olah raga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sleman yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.



3. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan dan Olah Raga;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
11. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Dinas Pasar;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Badan Kepegawaian Daerah;
18. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
20. Inspektorat Kabupaten;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
23. Kantor Perpustakaan Daerah;
24. Kantor Arsip Daerah;



- 25. Kantor Lingkungan Hidup;
- 26. Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal;
- 27. Kantor Pelayanan Perizinan;
- 28. Satuan Pamong Praja;
- 29. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 30. Kecamatan;